



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DYAH TRI KUMOLOSA RI**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT**
3. NHK : **802155**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.109.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 301.000.000
2. Tanah Seluas 110 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.173.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA CIREBON, Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **160.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA SIEN TA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA H1B02NA2LO AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **128.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **77.459.848**

F. HARTA LAINNYA Rp. **22.969.608**

Sub Total Rp. **2.497.429.456**

III. HUTANG Rp. **816.065.666**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.681.363.790**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.